



Hukum Ekonomi Manajemen Dalam Pendidikan

Baiq Apri Malisa

Mahasiswa Institut Elkatarie

Email: aprimalisa@gmail.com

Abstrak

Bahwa dalam penelitian ini peneliti membahas tentang cara mengatur keuangan dalam pendidikan. Pendidikan sebagai suatu cara agar memahami peradaban dunia saat ini. Sekolah merupakan salah satu organisasi sektor publik di bidang pendidikan yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan generasi yang berkualitas. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, karakter, dan keterampilan. Ketiga faktor tersebut dapat dibentuk melalui proses pendidikan. Manajemen keuangan merupakan tindakan dalam kepengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat di pahami sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pendidikan sebagai suatu sarana menuju kesuksesan dan itulah mengapa penulis meneliti akan hal ini.

Kata Kunci : Hukum Ekonmi, Manajemen, Pendidikan.



Pendahuluan

Sekolah merupakan salah satu organisasi sektor publik di bidang pendidikan yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan generasi yang berkualitas. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, karakter, dan keterampilan. Ketiga faktor tersebut dapat dibentuk melalui proses pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk generasi muda yang berkepribadian, cerdas, dan mempunyai keterampilan (UU no. 20 tahun 2003). Mengingat pentingnya peran pendidikan mendorong pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan bagi siswa (Hapenciuc, Burciu, dan Cioba 2007; Sihono dan Yusof 2012).

Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung dengan adanya dana, sumber daya manusia, dan material (Hapenciuc et al.2007). Sumber dana sekolah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomer 48 tahun 2008). Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana keuangan sekolah mengacu padapengelolaan keuangan Negara. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan/daerah) harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pembahasan

Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin dari kata “manus” yang artinya “tangan” dan “agere” yang berarti “melakukan”. Kata-kata ini digabung menjadi “managere” yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan denganmendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Manajemen menurut para ahli. Manajemen menurut Terry (1986) adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Harsey dan Blanchard (1988: 4) manajemen adalah proses bekerja

sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Sulfemi (2018:61-62)

Manajemen Keuangan dalam Pendidikan

Manajemen keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis bagi keberlangsungan sekolah. Depdiknas (2000) menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan dalam kepengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat di pahami sebagai rangkaian aktivitas mengatur keungan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public. Di samping itu, juga prinsip efektivitas perlu di perhatikan :



1. Transparasi.

Transparasi dapat dipahami sebagai keterbukaan, artinya dalam pengelolaan keuangan sekolah di perlukan adanya keterbukaan. Keterbukaan tersebut berkaitan keterbukaan sumber-sumber penerimaan sekolah, jumlah dana yang dikelola sekolah, serta penganggungjawaban penggunaan dana sekolah. Melalui keterbukaan akan menimbulkan kepercayaan dari stakeholders sekolah, antara lain pemerintah, masyarakat luas, orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, alumni, dan unsur-unsur lainnya.

2. Akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam perspetif manajemen keuangan dapat di pahami sebagai penggunaan dana sekolah yang dapat di pertanggungjawabkan dengan baik sesuai denan ketentuan yang berlaku, pertanggung jawaban dana sekolah dapat ditunjukkan bagi stakeholders sekolah.

3. Efektivitas.

Efektivitas dapat dipahami sebagai kesesuaian antara hasil yang di capai dan hasil yang di harapkan. Kepala sekolah harus mampu mendorong seluruh personal sekolah untuk memanfaatkan dana sekolah sesuai dengan peruntukannya.

4. Efisiensi.

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara usaha dan hasil yang di capai. Efisiensi memiliki kriteria yang meliputi pelaksanaan cara-cara tertentu tanpa mengurangi tujuannya, merupakan cara termudah untuk mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkey waktunya, teringan bebannya, terpendek jaraknya.

Melalui implementasi manajemen keuangan sekolah yang profesional diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana keuangan sekolah
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana keuangan sekolah
- c. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana keuangan sekolah
- d. Meingkatkan trasparasi penggunaan dana keuangan sekolah



- e. Meminimalkan tingkat penyelewengan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- f. Menjamin ketersediaan dana sekolah jika sekolah membutuhkannya.

Manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Adapun prosedur manajemen keuangan sekolah adalah:

1. Dana masukan (*input*)
2. Budgeting (perencanaan anggaran), meliputi kegiatan penentuan RAPBS, diajukan ke Kakanwil Provinsi, disetujui oleh BP3, disahkan oleh Gubernur, APBS yang sah.
3. *Thouput* (pelaksanaan proses/operasional).
4. *Output* (hasil usaha).

Disebutkan dalam UUSPN Tahun 2003 pasal 48 ayat 1. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan *akuntabilitas public*.

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula sekolah. Soal-soal yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada: uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.

Manajemen keuangan yang berasal dari negara (Pemerintah) yang dimaksud keuangan dari negara ialah meliputi pembayaran gaji pegawai/guru dan belanja barang. Untuk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa format sebagai berikut.



1. Lager Gaji (Daftar Permintaan Gaji)
2. Buku catatan SPMU (Surat Perintah Mengambil Uang).

Manajemen keuangan yang berasal dari BP3, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), bertugas untuk memberikan bantuannya dalam penyelenggaraan sekolah. Bantuan ini dapat berbentuk uang tetapi mungkin pula dalam bentuk lain seperti usaha perbaikan sekolah, pembangunan lokal baru, dan sebagainya.

Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tampaknya memadukan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Dalam hal ini ada beberapa anggaran yang lebih ditetapkan oleh pengaturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya. Sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Dengan demikian, pola pengelolaan anggaran belanja sekolah, terbatas pada pengelolaan tingkat operasional. Salah satu kebijakan tingkat sekolah adanya pencarian tambahan dan dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya, cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dengan semangat MBS sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang sangat lebar dalam kaitannya dengan pengelolaan dana.

Pembiayaan Pendidikan dan sumber pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Ada banyak sekali pengertian pembiayaan Pendidikan dari para tokoh-tokoh yang sangat berperan aktif dalam dunia Pendidikan. Salah satunya menurut Supriadi dalam bukunya yang berjudul Satuan Biaya



Pendidikan dasar dan menengah, ia berpendapat bahwa (cost), merupakan



salah satu komponen masukan (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan sekolah.

Kemudian menurut harsono dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. Biaya dapat diartikan sebagai semua semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan. Sedangkan menurut Hallak, dalam bukunya yang berjudul Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan. Biaya Pendidikan dapat juga diartikan sebagai kegiatan pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat diharga dengan uang)

Dapat kita simpulkan bahwa Pembiayaan merupakan salah satu salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga, atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan Pendidikan, lebih terasa lagi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

5. Sumber sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam pengeluaran pembiayaan Pendidikan , ada beberapa sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan Pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah baik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat/ orang tua/ wali siswa, dan Lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari :

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembiayaan Pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan Pendidikan melalui Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan Pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah



sudah mempunyai per undang-undangan dalam hal pembiayaan nasional , bantuan tersebut berupa :

1) Dana BOS

Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan Pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai Pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang di terima sekolah di hitung berdasarkan jumlah siswa masing masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS memberikan memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya oprasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan oprasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya Sebagian kecil saja dan umumnya sekolah relative kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orang tua siswa.

2) Dana BSM

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya Pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar



kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran Pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja.

b. Orang tua/ Wali siswa

Selain pembiayaan Pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan Pendidikan dari orang tua/wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa disebut infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk Pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini di tunjukkan komponen-komponen berlaku untuk semua sekolah, namun data ini mampu memberikan gambaran tentang banyaknya pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal hal yang menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” di pungut sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk Pendidikan antara lain :

- 1) Uang pangkal
- 2) Uang sekolah Bulanan/SPP
- 3) Biaya ulangan tengah semester
- 4) Biaya ulangan akhir smestwr
- 5) Biaya kegiatan ekstrakurikuler
- 6) Biaya kegiatan praktikum
- 7) Pembelian buku pelajaran/LKS
- 8) Pembelian pakaian seragam sekolah
- 9) Biaya karyawisata/Bina Mental/Retret
- 10) Sumbangan sosial (APP dan AAP)
- 11) Biaya biaya lainnya

Peran seerta orang tua/wali siswa dalam Pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan Pendidikan. Dengan demikian terjalin



Kerjasama yang baik antara orang tua murid/siswa dengan guru agar terlaksananya Pendidikan sesuai yang di harapkan.

Kesimpulan

Manajemen keuangan merupakan tindakan dalam kepengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat di pahami sebagai rangkaian aktivitas mengatur keungan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Manajemen keuangan memiliki aturan tersendiri, terdapat pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, odonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan otorisator. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawabkan.

Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Sumber pendapatan sekolah adalah dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana BOS, *block grant*, bantuan sosial dan dana dekonsentrasi ke propinsi, sementara yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana sharing



yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Daftar Pustaka

Anwar, Moch Idochi. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013.

[https://www.researchgate.net/publication/339433187 Sumber dan Pengeluaran Pembiayaan Pendidikan di Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/339433187_Sumber_dan_Pengeluaran_Pembiayaan_Pendidikan_di_Indonesia)

file:///C:/Users/user/Downloads/Manajemen%20keuangan%20(3).pdf